



**PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**KECAMATAN ILE BOLENG**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**(LKPJ)**



**KANTOR CAMAT ILE BOLENG**

**TAHUN : 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua unsur Aparatur Kecamatan Ile Boleng maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ) Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Ile Boleng tahun 2022 merupakan laporan yang dibuat setiap tahun sebagai bahan evaluasi Camat dalam mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) baik tingkat Kabupaten maupun Propinsi.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ile Boleng pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas segala partisipasi dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng ini menjadi acuan dalam tugas dan fungsi pelayanan kita kepada masyarakat.

Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Terima kasih .

Senadan, 27 Januari 2022  
Camat Ile Boleng  
YAKOBUS SUBAN SUGI, S.Pt.  
Perdana  
NIP.197304032000121001.

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| Kata Pengantar.....  | i  |
| Daftar Isi.....  | ii |
| Bab. I : Pendahuluan .....   | 2  |
| 1.1. Dasar Hukum.....  | 1  |
| 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....  | 2  |
| 1.3. Data Umum Daerah.....   | 3  |
| Bab. II : Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja<br>Daerah.....  | 7  |
| Bab. III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi<br>Kewenangan Daerah.....  | 10 |
| 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....  | 11 |
| 3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....  | 15 |
| 3.3. Kebijakan Program Kegiatan yang dilaksanakan sebagai<br>Tindak lanjut terhadap Rekomendasi DPRD yang diberikan<br>Pada tahun anggaran sebelumnya..... | 15 |
| Bab.IV. : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan<br>Penugasan.....   | 16 |
| Bab.V. : Penutup   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 17 |
| B. Saran .....   | 18 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Dasar Hukum

1. Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tkt. I Bali, NTB, dan NTT ( LNRI Tahun 1958, No. 122, tambahan LNRI No. 1655).
2. Undang – Undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 no. 126, Tambahan LNRI no. 4438).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 No.244, Tambahan LNRI No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 no. 26, Tamabahan LNRI no.5589).
4. Undang-Undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI tahun 2014 no. 292, Tambahan LNRI No. 5061).
5. PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2005 No. 165, Tambahan LNRI No. 4593).
6. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI tahun 2007 no. 82, Tambahan LNRI no.4737).
7. PP no.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (LNRI tahun 2008 no. 127.)
8. PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Perda Kabupaten Flores Timur no. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur (LD tahun 2016 no. 11 Tambahan LD no.0140).
10. Perbup. Flotim no. 15 tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati Flores Timur kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur.
11. Perbup. Flores Timur no. 31 tahun 2017 tentang Uraian tugas Kecamatan.
12. Surat Bupati Flores Timur, Nomor : Pem.130/198/Kjsm.OTDA/2022, tanggal 28 Desember 2022 tentang Penegasan Penyusunan LKPJ Tahun 2022.

## 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka Penyusunan LKPJ sebagai Pencapaian Kinerja Laporan, maka semua ini tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah yakni : **"Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata"**, dengan 5 Misi yaitu :

1. Selamatkan Orang Muda
2. Selamatkan Infrastruktur
3. Selamatkan tanaman Rakyat
4. Selamatkan Laut
5. Reformasi Birokrasi

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.

2. **Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur:** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur :** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat flores Timur:** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

4. **Selamatkan Laut Flores Timur** : dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** : dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government.  
Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Ile Boleng berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai akhir dalam Pencapaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka kondisi terakhir tidak maksimal pencapaian karena dampak Virus Corona 19 yang melanda, khususnya di Kabupaten Flores Timur.

### 1.3. Data Umum Daerah

#### 1. Data Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 08 Tahun 2004, wilayah Ile Boleng yang sebelumnya berstatus sebagai perwakilan kecamatan Adonara Timur ditetapkan sebagai kecamatan definitif dengan nomenklatur Kecamatan Ile Boleng sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi 21 (dua puluh satu) Desa, yaitu :

Secara Geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Boleng
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Boleng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Witihama
- sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Adonara Timur.

Keadaan topografi bervariasi seperti daratan lembah perbukitan dan lereng gunung serta tinggi dari permukaan laut terdiri dari :

- |    |                         |                         |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 0 – 5 m                 | : 8,74 km <sup>2</sup>  |
| 2. | 5 – 25 m                | : 16 km <sup>2</sup>    |
| 3. | 25 – 100 m              | : 15,20 km <sup>2</sup> |
| 4. | 500 - 100 m             | : 19 km <sup>2</sup>    |
| 5. | 100 – 1500 m            | : 13 km <sup>2</sup>    |
| 6. | 1500m                   | : 23 km                 |
| 7. | Kawah Gunung Ile Boleng | : 1.596m                |

Kecamatan Ile Boleng beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 400-500 mm/tahun.

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan Layanan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Ile Bolemg didukung dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kecamatan Ile Boleng baik instansi Vertikal otonom dan BUMN/BUMD yang ditempatkan pada wilayah termasuk penempatan personil PNS maupun Tenaga Kontrak Daerah serta Pihak Keamanan. Selama ini kerjasama yang terjalin cukup baik.

## 2. Jumlah Penduduk

| No. | Nama Desa        | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk |             |              | Jumlah KK   |             |             | Ketr. |
|-----|------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------|
|     |                  |              | L               | P           | Jlh          | L           | P           | Jlh         |       |
| 1   | 2                | 3            | 4               | 5           | 6            | 7           | 8           | 9           | 10    |
| 1   | Bedalewun        | 2.00         | 322             | 351         | 673          | 139         | 62          | 201         |       |
| 2   | Lebanuba         | 2.34         | 363             | 399         | 762          | 158         | 77          | 235         |       |
| 3   | Lewoblolong      | 1.11         | 155             | 209         | 364          | 69          | 50          | 119         |       |
| 4   | Bungalawan       | 2.86         | 343             | 435         | 778          | 164         | 76          | 240         |       |
| 5   | Lamawolo         | 5.07         | 684             | 786         | 1470         | 319         | 159         | 478         |       |
| 6   | Helanlangowuyo   | 5.70         | 1329            | 1364        | 2693         | 560         | 213         | 773         |       |
| 7   | Lewopao          | 4.65         | 884             | 934         | 1818         | 356         | 147         | 503         |       |
| 8   | Gayak            | 1.44         | 157             | 181         | 338          | 76          | 31          | 107         |       |
| 9   | Boleng           | 2.86         | 579             | 634         | 1213         | 232         | 126         | 358         |       |
| 10  | Neleblolong      | 1.29         | 226             | 265         | 491          | 110         | 64          | 174         |       |
| 11  | Duablolong       | 2.11         | 433             | 453         | 886          | 188         | 89          | 277         |       |
| 12  | Lewokeleng       | 3.02         | 292             | 306         | 598          | 130         | 45          | 175         |       |
| 13  | Nelelamawangi    | 1.79         | 206             | 233         | 439          | 90          | 52          | 142         |       |
| 14  | Harubala         | 2.20         | 302             | 359         | 661          | 153         | 78          | 231         |       |
| 15  | Nelelamadike     | 2.14         | 623             | 660         | 1283         | 273         | 110         | 383         |       |
| 16  | Lamabayung       | 2.53         | 516             | 552         | 1068         | 213         | 78          | 291         |       |
| 17  | Lewat            | 2.00         | 265             | 285         | 550          | 123         | 36          | 159         |       |
| 18  | Dokeng           | 2.23         | 157             | 167         | 324          | 59          | 24          | 83          |       |
| 19  | Bayuntaa         | 1.01         | 203             | 205         | 408          | 86          | 37          | 123         |       |
| 20  | Nobo             | 1.44         | 229             | 325         | 624          | 120         | 70          | 190         |       |
| 21  | Nelelamawangi II | 1.60         | 191             | 230         | 421          | 97          | 36          | 133         |       |
|     | <b>JUMLAH</b>    |              | <b>8529</b>     | <b>9333</b> | <b>17862</b> | <b>3715</b> | <b>1660</b> | <b>5375</b> |       |

### 3. Jumlah PNS

Jumlah P N S pada Kantor Camat Ile Boleng adalah : 15 orang yang terdiri dari :

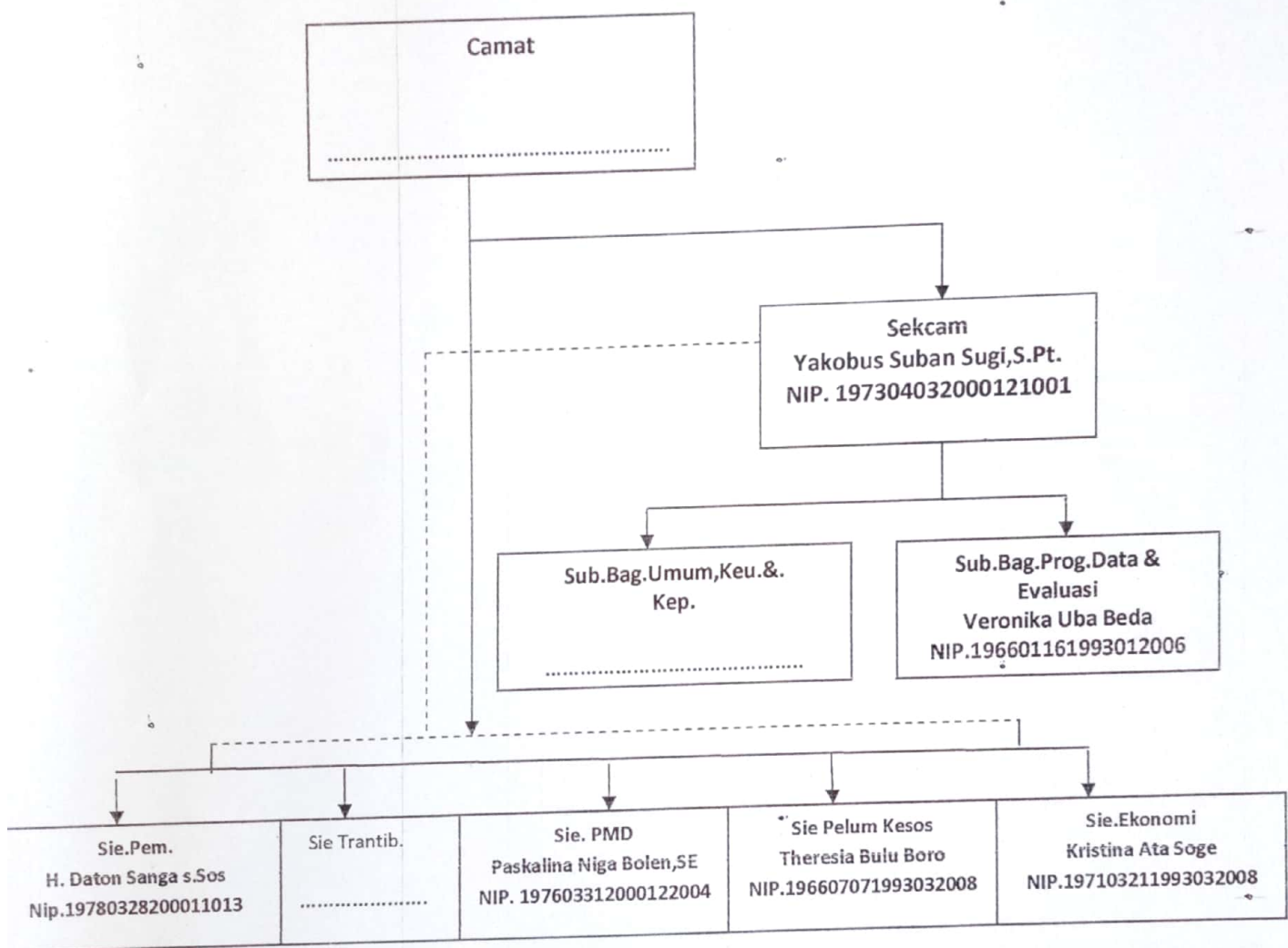
Pejabat Struktural Eselon III.b : 1 orang

Pejabat Struktural Eselon IV.a : 4 orang

Pejabat Struktural Eselon IV.b : 1 orang

Fungsional Umum : 9 orang

### STRUKTUR ORGANISASI PNS KANTOR CAMAT ILE BOLENG





↳ Pada struktur organisasi di atas terdapat lowong pada kolom Camat, Seksi Keamanan dan Ketertiban dan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Sejak masa Purna Bhakti Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban a.n. Hendrikus Mado Kiti tanggal 01 Agustus 2020, Camat a.n. Umar Raya Daen, S.IP pada tanggal 01 Juli 2022 dan mutasi keluar Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian a.n. Margaretha Masi Mangu Wuram, A.Md, sampai sekarang jabatan tersebut belum terisi, dan sebagai Pelaksana Tugas Camat (PLT.) a.n. Yakobus Suban Sugi, S.Pt. TMT. 01 Juli 2022.

## BAB. II

### PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ile Boleng tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut : ( TABEL. 2.1.)

Tabel 2.1.

## PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

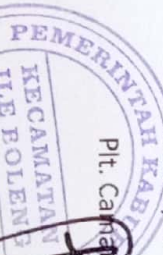
TAHUN ANGGARAN : 2022

| NO.   | PROGRAM/KEGIATAN   | DPA AWAL      | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/<br>BERKURANG | REALISASI     | %     | SISA PAGU   |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------|-------------|
| <b>A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |  |               |                   |                         |               |       |             |
| I   | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 30.000.000    | 40.000.000        |                         | 40.000.000    | 100   |             |
| 1   | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | 30.000.000    | 40.000.000        | 10.000.000              | 40.000.000    | 100   |             |
| II  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | 1.209.419.200 | 1.332.460.752     |                         | 1.166.077.364 | 87.51 | 166.383.388 |
| 2   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 1.189.559.200 | 1.312.660.752     | 123.101.552             | 1.146.277.364 | 87.32 | 166.383.388 |
| 3   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           | 19.860.000    | 19.800.000        | - 60.000                | 19.800.000    | 100   | -           |
| III   | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 73.763.338    | 91.263.338        |                         | 90.362.576    |       | 900.762     |
| 4   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | 2.999.338     | 2.999.338         |                         | 2.999.000     | 99.99 | 338         |
| 5   | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 19.939.000    | 19.939.000        | -                       | 19.939.000    | 100   | -           |
| 6   | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | 10.000.000    | 12.500.000        | 2.500.000               | 12.499.576    | 100   | 424         |
| 7   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                   | 900.000       | 900.000           | -                       | -             | -     | 900.000     |
| 8   | - Fasilitas Kunjungan Tamu   | 15.000.000    | 15.000.000        | -                       | 15.000.000    | 100   | -           |
| 9   | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi                          | 24.925.000    | 39.925.000        | 15.000.000              | 39.925.000    | 100   | -           |
| IV  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 81.170.000    | 81.170.000        |                         | 81.170.000    |       |             |
| 10  | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1.000.000     | 1.000.000         |                         | 1.000.000     | 100   |             |
| 11  | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 12.970.000    | 12.970.000        |                         | 12.970.000    | 100   |             |
| 12  | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | 67.200.000    | 67.200.000        |                         | 67.200.000    | 100   |             |
| V   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 9.991.250     | 15.991.250        | 6.000.000               | 14.891.220    |       | 1.100.030   |

|   |  |                      |                      |            |                      |       |                    |
|---|--|----------------------|----------------------|------------|----------------------|-------|--------------------|
| 14  | -Pmeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 2.999.300            | 8.999.300            | 6.000.000  | 8.999.300            | 100   | -                  |
| <b>B. PROGRAM PELAYANAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> |  |                      |                      |            |                      |       |                    |
| VI  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 30.000.000           | 37.000.000           |            | 37.000.000           | 100   | -                  |
| 15  | -Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 30.000.000           | 37.000.000           | 7.000.000  | 37.000.000           | 100   | -                  |
| <b>C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>    |  |                      |                      |            |                      |       |                    |
| VII   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 58.800.000           | 58.800.000           | -          | 47.100.000           | 80.10 | 11.700.000         |
| 16  | -Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 58.800.000           | 58.800.000           | -          | 47.100.000           | 80.10 | 11.700.000         |
| <b>D. PROGRAM PEMBINAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAH DESA</b>     |  |                      |                      |            |                      |       |                    |
| VIII  | Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                 | 45.000.000           | 55.000.000           |            | 55.000.000           |       | -                  |
| 17  | - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa   | 20.000.000           | 30.000.000           | 10.000.000 | 30.000.000           | 100   | -                  |
| 18  | -Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.                               | 25.000.000           | 25.000.000           | -          | 25.000.000           | 100   | -                  |
| <b>Jumlah</b>   |  | <b>1.538.143.788</b> | <b>1.711.685.340</b> |            | <b>1.531.601.160</b> |       | <b>180.084.180</b> |

Senadan, 27 Januari 2022

Plt. Camat Poleang,



YAKOBUS SUBAN SUGI, S.Pt.

Pemilihan  
NIP. 1973040320000121001

## BAB. III

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### 3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sesuai Program Kegiatan pada RKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2022, maka Kantor Camat Ile Boleng mempunyai 4 (empat) Program, 8 Kegiatan dengan 19 sub Kegiatan.

Namun, sejak adanya wabah Virus Corona 19, maka sejak Tahun Anggaran 2020 sampai sekarang Program kegiatan Belanja Modal tidak ditetapkan dalam APBD Kabupaten Flores Timur karena diprioritaskan untuk penanganan wabah Virus Corona 19, sehingga tersisa 8 kegiatan dengan capaian pelaksanaannya seperti terlihat pada tabel berikut ini : (Tabel. 3.1.)

Tabel. 3.1.  
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

| No. | OPD Pelaksana           | Urusan Pemerintahan | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan   | Target       |               | Realisasi    |               | % Capaian | Sisa Anggaran | Permasalahan | Upaya Mengatasi  | Tinjauan Rekomendasi DPRD |
|-----|-------------------------|---------------------|-----------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------|--|---------------------------|
|     |                         |                     |           |   | Kinerja      | Anggaran      | Kinerja      | Anggaran      |           |               |              |  |                           |
| 1   | 2                       | 3                   | 4         | 5   | 6            | 7             | 8            | 9             | 10        | 11            | 12           | 13   | 14                        |
|     |                         |                     |           | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |              | 40.000.000    |              | 40.000.000    | 100%      |               |              | 1. Mengusulkan penambahan anggaran   |                           |
|     |                         |                     |           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Dok.       | 40.000.000    |              | 40.000.000    | 100%      |               |              | 2. Mengusulkan kepada tim anggaran Kabupaten Flores Timur, agar dalam penetapan anggaran perlu juga mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah desa. |                           |
|     |                         |                     |           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              | 1.332.460.752 |              | 1.166.077.364 |           |               |              | 2. Pagu Anggaran Tidak diimbangi dengan luas wilayah dan jumlah desa   |                           |
|     |                         |                     |           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 14/12 bln    | 1.312.660.752 | 17/12 bln    | 1.146.277.364 | 87,32%    | 166.383.388   |              | 3. Kurangnya fasilitas/sarana penunjang kegiatan   |                           |
|     |                         |                     |           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 4 org/12 bln | 19.800.000    | 4 org/12 bln | 19.800.000    | 100%      |               |              | 3. Perlu adanya Belanja Modal pada Penetapan   |                           |
|     |                         |                     |           | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |              | 91.263.338    |              | 90.362.576    | 100%      |               |              |  |                           |
|     | KANTOR CAMAT ILE BOLENG |                     |           |   |              |               |              |               |           |               |              |  |                           |

KANTOR CAMAT ILE BOLENG

|  |           |                   |           |                   |             |         |  |  |  |
|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|---------|--|--|--|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 20 jen    | 2.999.338         | 20 jenis  | 2.999.000         | 99%         | 338     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | 30 jenis  | 19.939.000        | 30 jenis  | 19.939.000        | 100%        |         |  |  |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | 30000 lbr | 12.500.000        | 30000 lbr | 12.499.576        | 99%         | 424     |  |  |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | 1 jenis   | 900.000           | 1 jenis   | -                 | 0%          | 900.000 |  |  |  |
| Fasilitas Kunjungan Tamu   | 250 o/k   | 15.000.000        | 250 o/k   | 15.000.000        | 100%        | -       |  |  |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | 45 kali   | 39.925.000        | 45 kali   | 39.925.000        | 100%        | -       |  |  |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |           | <b>81.170.000</b> |           | <b>81.170.000</b> | <b>100%</b> |         |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | 100 lbr   | 1.000.000         | 100 lbr   | 1.000.000         | 100%        |         |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | 12 bln    | 12.970.000        | 12 bln    | 12.970.000        | 100%        |         |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | 7 org     | 67.200.000        | 7 org     | 67.200.000        | 100%        |         |  |  |  |

| KANTOR CAMAT ILE BOLENG  |   |   |         |            |         |            |        |           |  |  |
|--|---|---|---------|------------|---------|------------|--------|-----------|--|--|
| PROGRAM<br>PENYELENGGAR<br>AAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN<br>PELAYANAN<br>PUBLIK | Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>yang tidak<br>dilaksanakan oleh<br>Unit Kerja Perangkat<br>Daerah yang ada di<br>Kecamatan  | Peningkatan<br>Efektifitas<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan kepada<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan | 30 kali | 37.000.000 | 30 kali | 37.000.000 | 100%   |           |  |  |
|  |   |   |         |            |         |            |        |           |  |  |
|  | Pemeliharaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  |   |         | 15.991.250 |         | 14.891.220 | 94,82% |           |  |  |
|  | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan |   | 8 unit  | 6.991.950  | 8 unit  | 5.891.920  | 84,27% | 1.100.030 |  |  |
|  | Pemeliharaan<br>/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan<br>lainnya  |   | 1 unit  | 8.999.300  | 1 unit  | 8.999.300  | 100%   |           |  |  |
|  |   |   |         |            |         |            |        |           |  |  |



| PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |  | Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                         | 1<br>pket  | 58.800.000           | 1<br>paket | 47.100.000           | 80.10%        | 11.700.000         |  |  |  |
|--|--|---|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------|--|--|--|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA |  | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |            |                      |            |                      |               |                    |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |            |                      |            |                      |               |                    |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                | 21<br>desa | 30.000.000           | 21<br>desa | 30.000.000           | 100%          |                    |  |  |  |
|  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  | 2 kali     | 25.000.000           | 2 kali     | 25.000.000           | 100%          |                    |  |  |  |
|  |  | <b>JUMLAH</b>   |            | <b>1.711.685.340</b> |            | <b>1.531.601.160</b> | <b>89.48%</b> | <b>180.084.180</b> |  |  |  |

KANTOR CAMAT ILE BOLENG

Sehaden, 27 Januari 2022

Pt. Camat Ile Bo leng

YAKOBUS SUBAN SUGI, S.Pt.  
Pembina



NIP. 197304032000121001

### 3.1.1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Program

Kecamatan Ile Boieng sebagaimana Kecamatan pada umumnya di Kabupaten Flores Timur memiliki 8 (delapan) Program Kegiatan

Kedelapan Program Kegiatan tersebut terdapat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program apabila ditinjau dari sisi kuantitatif Pagu Anggaran Program dengan Kegiatan.

Akan tetapi ditinjau dari sisi kualitatif Kegiatan tentu masih terdapat kekurangan karena Pagu Anggaran Program tidak mencukupi membiayai kegiatan-kegiatan dengan berbagai Dinamika Permasalahan yang ada di wilayah.

Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tabel 3.1. di atas maka dapat dianalisa kesesuaian antara Kegiatan dengan target kinerja Program untuk tahun 2022 sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Target kinerja anggaran       | : Rp. 40.000.000 |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : Rp. 40.000.000 |
| Rasio pencapaian              | : 100 %          |

#### 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Target kinerja anggaran       | : Rp. 1.332.460.752  |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : Rp. 1.166.077.364. |
| Rasio pencapaian              | : 87,51 %            |

#### 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Target Kinerja anggaran       | : Rp. 91.263.338 |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : Rp. 90.362.576 |
| Rasio Pencapaian              | : 99,01 %        |

#### 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Target Kinerja Anggaran       | : Rp. 81.170.000 |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : Rp. 81.170.000 |
| Rasio Pencapaian              | : 100 %          |

#### 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Target Kinerja Anggaran    | : 15.991.250 |
| Realisasi Program Kegiatan | : 14.891.220 |
| Rasio Pencapaian           | : 94,82 %    |

**6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Target Kinerja Anggaran       | : Rp. 37.000.000 |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : Rp. 37.000.000 |
| Rasio Pencapaian              | : 100 %          |

**7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Target Kinerja Anggaran       | : 58.800.000 |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : 47.100.000 |
| Rasio Pencapaian              | : 80.10 %    |

**8. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Target Kinerja Anggaran       | : Rp. 55.000.000 |
| Realisasi Pelaksanaan Program | : Rp. 55.000.000 |
| Rasio Pencapaian              | : 100 %          |

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

| No  | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah yang diselesaikan |
|-----|---------------------|-------------|----------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)         | (4)                              |
|     |                     |             |                                  |

3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

| No. | Rekomendasi DPRD Tahun 2019 | Tindak Lanjut | Tujuan/Masalah yang diselesaikan |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| (1) | (2)                         | (3)           | (4)                              |
|     |                             |               |                                  |

## BAB. IV

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

( Diisi oleh OPD yang melaksanakan tugas pembantuan )

## BAB. V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Boleng ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng selama Tahun 2022 kepada Para Stakeholder di Kabupaten Flores Timur, untuk dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dalam menilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng, demi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain:

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya. optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja..Tahun 2021 sudah dirasa mengarah kepada tingkatandiperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (Penegakan Hukum, Akuntabilitas dan Professional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
4. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.

5. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

#### B. Saran

Memperhatikan isi Laporan ini, maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut serta upaya/langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Ile Boleng;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur pelaksana Program dan Kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.
7. Diperlukan merehabilitasi gedung Kantor Camat yang saat ini terasa kurang memadai lagi karena tidak dapat menampung para pegawai dalam melaksanakan tugas. Atau dilakukan perluasan gedung agar semua pegawai yang bekerja di kantor camat dapat tertampung dalam ruang kerja dan nyaman dalam melaksanakan aktivitas.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tingkat Kecamatan Ile Boleng ini dibuat dan tentunya masih ada kekurangan yang harus di sempurnakan pada masa yang akan datang. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan/usul saran dan pertimbangan dari Bapak Bupati untuk perbaikan dan kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bagian dari Laporan yang tergabung dengan SKPD lainnya.

Sekian dan terima kasih.

Senadan, 27 Januari 2022  
Plt. Camat Ile Boleng,  
**YAKOBUS SUBAN SUGI, S.Pt.**  
Pembina  
NIP.197304032000121001.

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR**  
**LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER SUB KEGIATAN**

per 31 Desember 2022

Sub Unit : Kantor Camat Ile Bolong

| KODE                                | URAIAN  | ANGGARAN         | REALISASI        |               |       | SISA ANGGARAN    |        |                |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-------|------------------|--------|----------------|
|                                     |   |                  | PEGAWAI          | BARANG & JASA | MODAL |                  | TOTAL  | %              |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.01   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |                  |                  |               |       |                  |        |                |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.01   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 40.000.000,00    | 0,00             | 40.000.000,00 | 0,00  | 40.000.000,00    | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.01.0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |                  |               |       |                  |        |                |
|                                     | TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH       | 40.000.000,00    | 0,00             | 40.000.000,00 | 0,00  | 40.000.000,00    | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |                  |               |       |                  |        |                |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.02.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 1.312.660.752,00 | 1.146.277.364,00 | 0,00          | 0,00  | 1.146.277.364,00 | 87,32  | 166.383.388,00 |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.02.3 | Pelaksanaan Penerimaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 19.800.000,00    | 19.800.000,00    | 0,00          | 0,00  | 19.800.000,00    | 100,00 | 0,00           |
|                                     | TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                 | 1.332.460.752,00 | 1.166.077.364,00 | 0,00          | 0,00  | 1.166.077.364,00 | 87,51  | 166.383.388,00 |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                  |                  |               |       |                  |        |                |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 2.999.338,00     | 0,00             | 2.999.000,00  | 0,00  | 2.999.000,00     | 99,99  | 338,00         |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06.4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 19.939.000,00    | 0,00             | 19.939.000,00 | 0,00  | 19.939.000,00    | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan  | 12.500.000,00    | 0,00             | 12.499.576,00 | 0,00  | 12.499.576,00    | 100,00 | 424,00         |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06.6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 900.000,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00   | 900.000,00     |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06.8 | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 15.000.000,00    | 0,00             | 15.000.000,00 | 0,00  | 15.000.000,00    | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.06.9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 39.925.000,00    | 0,00             | 39.925.000,00 | 0,00  | 39.925.000,00    | 100,00 | 0,00           |
|                                     | TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                     | 91.283.338,00    | 0,00             | 90.362.576,00 | 0,00  | 90.362.576,00    | 99,01  | 900.762,00     |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |                  |                  |               |       |                  |        |                |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.08.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.000.000,00     | 0,00             | 1.000.000,00  | 0,00  | 1.000.000,00     | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.08.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 12.970.000,00    | 0,00             | 12.970.000,00 | 0,00  | 12.970.000,00    | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.08.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 67.200.000,00    | 0,00             | 67.200.000,00 | 0,00  | 67.200.000,00    | 100,00 | 0,00           |
|                                     | TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                   | 81.170.000,00    | 0,00             | 81.170.000,00 | 0,00  | 81.170.000,00    | 100,00 | 0,00           |
| 0.00.7-01.0-00.0-00.13.0.0.1.2.09   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 |                  |                  |               |       |                  |        |                |



Printed By SIMDA-NG | 1/3

| KODE   | URAIAN  | ANGGARAN                    | REALISASI                   |                           |                 |                             | SISA             |                           |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
|  |   |                             | PEGAWAI                     | BARANG & JASA             | MODAL           | TOTAL                       |                  | %                         |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 1.2.09.1          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pelembagaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                   | 6.991.950,00                | 0,00                        | 5.891.920,00              | 0,00            | 5.891.920,00                | 84,27            | 1.100.030,00              |
| 0.00 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 1.2.09.9          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 8.999.300,00                | 0,00                        | 8.999.300,00              | 0,00            | 8.999.300,00                | 100,00           | 0,00                      |
| <del>7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 2.2.02</del> | <del>TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</del>   | <del>1.560.885.340,00</del> | <del>1.166.077.364,00</del> | <del>226.423.796,00</del> | <del>0,00</del> | <del>1.392.501.160,00</del> | <del>89,21</del> | <del>168.384.180,00</del> |
| <del>7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 2.2.02</del> | <del>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</del>  | <del>15.991.250,00</del>    | <del>0,00</del>             | <del>14.891.220,00</del>  | <del>0,00</del> | <del>14.891.220,00</del>    | <del>93,12</del> | <del>1.100.030,00</del>   |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 2.2.02.3          | TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  | 37.000.000,00               | 0,00                        | 37.000.000,00             | 0,00            | 37.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                | 37.000.000,00               | 0,00                        | 37.000.000,00             | 0,00            | 37.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 5.2.01            | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 37.000.000,00               | 0,00                        | 37.000.000,00             | 0,00            | 37.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
|  | TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 37.000.000,00               | 0,00                        | 37.000.000,00             | 0,00            | 37.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
|  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | 37.000.000,00               | 0,00                        | 37.000.000,00             | 0,00            | 37.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 5.2.01            | TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN | 58.800.000,00               | 0,00                        | 47.100.000,00             | 0,00            | 47.100.000,00               | 80,10            | 11.700.000,00             |
|  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah  | 58.800.000,00               | 0,00                        | 47.100.000,00             | 0,00            | 47.100.000,00               | 80,10            | 11.700.000,00             |
|  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 58.800.000,00               | 0,00                        | 47.100.000,00             | 0,00            | 47.100.000,00               | 80,10            | 11.700.000,00             |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 6.2.01            | TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | 96.800.000,00               | 0,00                        | 84.200.000,00             | 0,00            | 84.200.000,00               | 86,98            | 12.600.000,00             |
|  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  | 58.800.000,00               | 0,00                        | 47.100.000,00             | 0,00            | 47.100.000,00               | 80,10            | 9.700.000,00              |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 6.2.01            | TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH  | 30.000.000,00               | 0,00                        | 30.000.000,00             | 0,00            | 30.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 6.2.01.3          | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   | 30.000.000,00               | 0,00                        | 30.000.000,00             | 0,00            | 30.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
| 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13.0.0 . 6.2.01.9          | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa  | 25.000.000,00               | 0,00                        | 25.000.000,00             | 0,00            | 25.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
|  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa  | 25.000.000,00               | 0,00                        | 25.000.000,00             | 0,00            | 25.000.000,00               | 100,00           | 0,00                      |
|  | <b>Jumlah</b>   | <b>1.711.685.340,00</b>     | <b>1.166.077.364,00</b>     | <b>365.523.796,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.531.601.160,00</b>     | <b>89,48</b>     | <b>180.084.180,00</b>     |

